

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Era perkembangan teknologi yang semakin pesat di berbagai negara mendukung proses untuk terjadinya keterkaitan berbagai hubungan dalam proses peningkatan standar suatu negara dimata dunia. Sektor-sektor tertentu yang mengalami peningkatan adalah ilmu pengetahuan, perekonomian dan teknologi. Perkembangan revolusi industri menjadi salah satu bagian yang ikut berkontribusi serta sebagai bukti perkembangan ilmu pengetahuan, perekonomian dan teknologi yang semakin pesat. Keberadaan perkembangan serta penerapan dari revolusi industri, memudahkan akses bagi setiap individu dalam menerima sebuah informasi. Kotribusi di berbagai belahan dunia ikut andil dalam mewujudkan konsep dari revolusi industri 4.0, serta menggunakan istilah yang berbeda dalam penerapannya seperti *Smart Factories, Industrial Internet of Things, Smart Industry*. Penggunaan istilah yang berbeda dari setiap negara membuat semua pihak yang ikut berpartisipasi memiliki tujuan sama yaitu guna meningkatkan daya saing disetiap industri disuatu negara dalam menghadapi pasar global yang semakin hari kian dinamis. Kondisi ini dipengaruhi oleh pesatnya pemanfaatan teknologi digital diberbagai bidang (Prasetyo & Sutopo, 2018).

Globalisasi menurut KBBI (2020) merupakan suatu proses masuknya hasil berbagai bidang ke ruang lingkup dunia, tanpa adanya batasan secara teritorial yang harus dipikirkan oleh setiap individu saat memasuki lingkup tersebut. Globalisasi telah menggerakkan adanya agenda penelitian bisnis

internasional selama tiga dekade terakhir (Meyer, 2017). Perkembangan kehidupan dunia yang semakin cepat mengindikasikan kebutuhan dari setiap manusia yang semakin beragam tergantung dari kebudayaan dan tujuan dari individu tersebut. Aktivitas dari setiap individu pada era global seperti saat ini memudahkan untuk terjadinya perpindahan dampak dari satu negara ke negara lain.

Globalisasi memiliki pengaruh yang mendalam terhadap perkembangan teknologi dan peningkatan standar ilmu pengetahuan. Perubahan lingkungan dibidang ilmu pengetahuan memberikan dampak terhadap dunia kesehatan. Tingkat kesadaran akan kesehatan masyarakat di suatu negara memberikan efek terhadap pertumbuhan pendapatan dan distribusi, ketidakstabilan ekonomi, ketersediaan kesehatan dan layanan sosial lainnya, stres dan faktor lainnya. Hal tersebut dikarenakan masyarakat dapat beraktivitas secara maksimal. Status kesehatan dipengaruhi oleh kondisi awal dari masing-masing negara yang telah melakukan adanya reformasi, yaitu berupa ukuran dan spesialisasi internasional ekonominya, ketersediaan dan distribusi aset, manusia modal dan infrastruktur, dan kualitasnya kebijakan dari dalam negeri tersebut (Cornia, 2001).

Kemampuan setiap manusia dapat berubah dalam menjalani kegiatan disetiap harinya apabila dipengaruhi oleh kondisi tubuh yang tidak mendukung akibat terpapar penyakit tertentu. Apabila seseorang yang terjangkit penyakit tidak mampu berkegiatan dengan semestinya. Hal ini dapat mempengaruhi kondisi perekonomian di negara tersebut, dengan

keadaan seperti itu suatu perusahaan tidak dapat menggunakan sumber daya yang mereka miliki dan berakibat terhadap kondisi keuangan perusahaan. Kondisi keuangan setiap perusahaan yang menurun memberikan dampak terhadap pendapatan negara serta perekonomiannya.

Hingga akhir abad ke-19 sejarah virus hanya menjadi bagian dari jejak penyakit menular. Dalam bahasa latin virus berarti “racun” atau cairan racun serupa. Virus adalah sesuatu yang bisa menghasilkan penyakit (LWOFF, 1957). Penyakit yang berasal dari virus memberikan dampak yang meluas terhadap suatu negara, seperti penelitian yang dilakukan oleh (Joo et al., 2019) menyatakan bahwa dampak dari menyebarnya virus MERS-CoV pada industri terkait pariwisata di Republik Korea pada tahun 2015 menimbulkan pendapatan yang hilang sebesar US\$ 2,6 miliar.

Kemudian penelitian yang dilakukan oleh (Keogh-Brown & Smith, 2008) mengestimasi kerugian yang didapatkan dari meluasnya virus SARS dari sektor pariwisata di Cina mencapai US\$ 3,5 miliar dan US\$ 1,7 miliar di Malaysia. Hal tersebut diakibatkan oleh penutupan objek-objek wisata yang berada di negara tersebut. Suatu penyakit berskala pandemi memberikan dampak yang besar terhadap perekonomian di suatu negara. Selain itu dapat mengubah tatanan kehidupan di negara tersebut untuk meminimalisir dampak yang dihasilkan agar kondisi perekonomian dapat pulih.

Kompleksitas kehidupan yang dibarengi oleh kebutuhan manusia beragam dapat memicu jenis-jenis penyakit baru dari satu kloni yang sama

yaitu *Corona Virus Diseases 2019* atau yang sering disebut dengan COVID-19. *Corona Virus* termasuk kedalam keluarga *Coronaviridae*, bentuknya yang menyerupai seperti mahkota di permukaan luar dari virus yang menjadikannya dijuluki sebagai *coronavirus*. COVID-19 merupakan infeksi virus yang menular yang disebabkan oleh sindrom pernafasan akut SARS-CoV-2 yang berasal dari Wuhan, China dan menyebar ke seluruh dunia, pada awalnya cara perluasan virus tersebut adalah dengan kontak langsung antara kelelawar dengan manusia. Namun seiring perkembangan waktu penyebaran secara luas terjadi antarmanusia dengan manusia lainnya yang sudah terinfeksi (Shereen et al., 2020).

Sejak Februari 2020 Indonesia telah menginformasikan bahwa terdapat warga negara indonesia (WNI) yang terinfeksi COVID-19. Kondisi tersebut memberikan dampak terhadap perekonomian seperti adanya peristiwa *panic buying* yang dilakukan oleh masyarakat, penimbunan terhadap beberapa jenis barang kesehatan, adanya perubahan tatanan perekonomian yang mewajibkan adanya peralihan untuk melakukan pekerjaan dari rumah, serta penutupan sementara terhadap beberapa sektor perekonomian yang diindikasikan akan memperbesar penyebaran penyakit COVID-19.

Negara-negara yang terjangkit *virus corona* mengupayakan berbagai cara dalam meminimalisir penyebaran dari virus tersebut, salah satunya dengan menerapkan *social distancing* (jarak sosial). Penetapan kebijakan kebijakan jarak sosial dapat dilakukan dengan penutupan fasilitas umum,

kampanye propaganda, dan upaya lain yang bertujuan untuk mengurangi kebiasaan tingkat kontak yang terjadi diantara orang-orang (Fenichel, 2013). Sedangkan peran di Indonesia untuk menekan penyebaran luas dari *virus corona* adalah dengan menerapkan pembatasan sosial berskala besar (PSBB). Melalui program tersebut pemerintah melakukan otoritas dengan menerapkan jarak minimum apabila bertemu dengan seseorang, melarang untuk melaksanakan kegiatan berskala besar, dan menutup sementara sektor perekonomian tertentu seperti pusat perbelanjaan, tempat wisata.

Kondisi perekonomian menurut (nasional.kontan,2020) terdapat beberapa sektor perekonomian di Indonesia mengalami dampak dari penyebaran *virus corona* dan memberikan dampak ekonomi secara massal di Indonesia. Penerapan kebijakan PSBB mengakibatkan banyak pekerja dirumahkan atau diputus hubungan kerja dengan pembatasan ruang gerak wilayahnya. Hal tersebut berakibat kepada para pekerja yang tidak dapat melakukan aktivitas untuk bekerja seperti rutinitas biasanya dan terpaksa menetap tanpa adanya penghasilan yang memadai.

Penyebaran COVID-19 di seluruh dunia secara masif berpengaruh terhadap keadaan perekonomian di beberapa sektor krusial suatu negara (*Economic Impact of Epidemics and Pandemics*, 2020). Sektor potensial yang terkena dampak ekonomi COVID-19 adalah:

1. Sektor kesehatan dan meminimalisir dampak virus
2. Sektor pertanian dan biaya perdagangan
3. Pariwisata dan perjalanan

Krisis keuangan yang terjadi pada tahun 2007 merupakan bencana ekonomi skala global. Dimana jutaan orang mengalami kehilangan pekerjaan mereka, tabungan atau bisnis mereka saat bank tidak berjalan baik dan kredit menurun. Hal yang sama dikhawatirkan dengan terjadinya wabah COVID-19, yang sangat mungkin menjadi pandemi global dan akan memberikan dampak yang sama buruknya, tetapi sementara gangguan ekonomi yang disebabkan oleh pandemi tampaknya akan besar, dan memiliki efek jangka panjang pada ekonomi yang jauh lebih parah daripada krisis keuangan. Diharapkan pemerintah bertindak cepat untuk meminimalisir jatuhnya ekonomi (Odendahl & Springford, 2020).

Sebelum terjadinya wabah *corona virus*, dunia telah mengalami dampak ekonomi lainnya seperti wabah SARS, MERS, dan H1N1. Hal pertama dan menjadi aspek penting saat terjadinya epidemik dan pandemi yaitu dapat menimbulkan penderitaan bagi manusia dan memberikan efek terhadap angka kematian seseorang. Namun penyebaran virus juga memiliki implikasi terhadap pertumbuhan ekonomi di suatu negara. Diperkirakan bahwa total kerugian yang ditimbulkan oleh pandemi influenza global yang parah (seperti pandemi 1918) dapat mencapai sekitar US \$ 500 miliar per tahun atau setara dengan 0,6% dari pendapatan global.

Peneliti menghitung estimasi yang bervariasi dari pengelompokan pendapatan dengan negara-negara berpenghasilan menengah ke bawah lebih banyak terkena dampak (1,6%) daripada negara yang memiliki penghasilan tinggi (*Economic Impact of Epidemics and Pandemics*, 2020). WHO dan

Bank Dunia memperkirakan dampak yang ditimbulkan dari pandemi bagi PDB Asia Selatan berpotensi turun 2% ( US \$ 53miliar) (Butler, 1999).

Dalam dunia pekerjaan hubungan antara pemilik usaha dengan pekerja memiliki keterkaitan satu sama lain. Dimana setiap pemilik usaha yang mempekerjakan seseorang diwajibkan untuk memberikan upah kerja kepada karyawan yang ia miliki. Apabila pekerja di perusahaan tersebut memiliki permasalahan atau mengalami kendala keuangan maka pemilik usaha memiliki hak untuk melakukan PHK kepada pekerjanya. Hal tersebut dapat mengacu kedalam UU No 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan. Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) merupakan suatu peristiwa pemutusan hubungan kerja antara pemilik usaha dengan tenaga kerja yang ia miliki.

Terdapat faktor pendorong terjadinya PHK, permasalahan yang sering terjadi dalam hubungan kerja adalah pembayaran upah (Manik et al., 2016).

Melalui fenomena pandemi yang terjadi adanya tanggapan yang dikeluarkan oleh Kementrian Keuangan (Kemenkeu) terhitung sampai 11 April 2020 sudah tercatat lebih dari 1,5 juta penduduk Indonesia mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK) serta dirumahkan. Terdapat 1,2 juta karyawan tersebut berasal dari usaha sektor formal dan 265.000 karyawan yang berasal dari sektor informal (Santoso dan Handoyo, 2020). Kenaikan akan jumlah masyarakat yang tidak memiliki pekerjaan berdampak terhadap kondisi perekonomian yang menurun dan susahny mendapat penghidupan.

Meluasnya wabah COVID-19 di Indonesia memberikan dampak yang besar terhadap perekonomian tidak hanya bagi karyawan swasta

namun, dialami juga oleh wiraswasta. hal ini dibuktikan dengan banyak perusahaan yang tutup, melakukan PHK kepada pada karyawan yang mereka miliki (Sandi, 2020). Efek yang ditimbulkan akibat *corona virus* tidak hanya terasa di daerah yang dikategorikan sebagai zona merah, pusat perekonomian dan bisnis di Indonesia. Hal itu juga terasa di wilayah yang tidak merasakan dampak terlalu besar dari wabah tersebut, kondisi ini dapat dilihat sejak awal meluasnya pandemi COVID-19 sebanyak 180 perusahaan yang memilih untuk tutup (khalid, 2020).

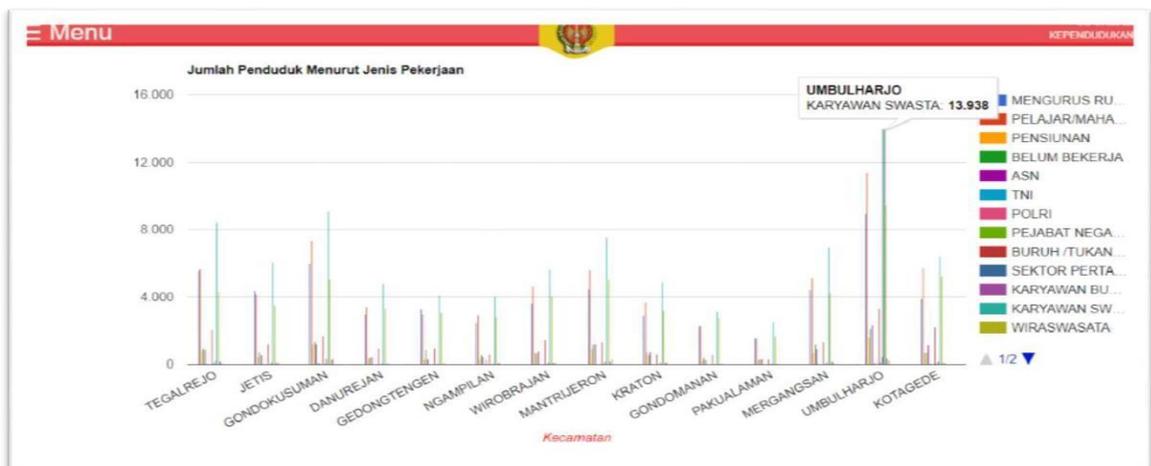
Setiap kota di Indonesia berupaya untuk menanggulangi dampak dari pandemi COVID-19, pengurangan dilakukan dengan berbagai kegiatan agar bisa menstabilkan kondisi kesehatan dan meminimalisir perekonomian masyarakat. Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan salah satu provinsi yang di Indonesia dengan yang perekonomiannya digerakan oleh sektor pariwisata dengan lebih dari 200 destinasi wisata yang berada di Yogyakarta (2019). Kota Yogyakarta menjadi daerah favorit untuk menghabiskan waktu libur. Sudah tiga tahun terakhir sejak tahun 2016, yogyakarta terus mengalami peningkatan pengunjung wisatawan, pada tahun 2018 jumlah wisatawan yang berdatangan mencapai 4,1 juta pengunjung (Satmaka, 2019).

Yogyakarta menjadi daerah yang menggantungkan perekonomiannya pada kegiatan pariwisata. Keberadaan wabah COVID-19 secara jelas mengurangi jumlah kunjungan wisatawan ke Yogyakarta memberikan dampak negatif kepada para pelaku usaha atau wiraswasta dan

karyawannya. Hal ini dibuktikan dengan kondisi wisata jogja yang menurun serta sepi dari pengunjung yang biasanya berdatangan untuk menikmati libur (Syambudi, 2020). Kondisi yang kian sepi dan penutupan tempat-tempat tertentu yang diindikasikan akan memperluas penyebaran virus, memberikan dampak seperti masyarakat yang mengalami kehilangan pekerjaan dan susahya pemenuhan kebutuhan hidup (Sunartono, 2020).

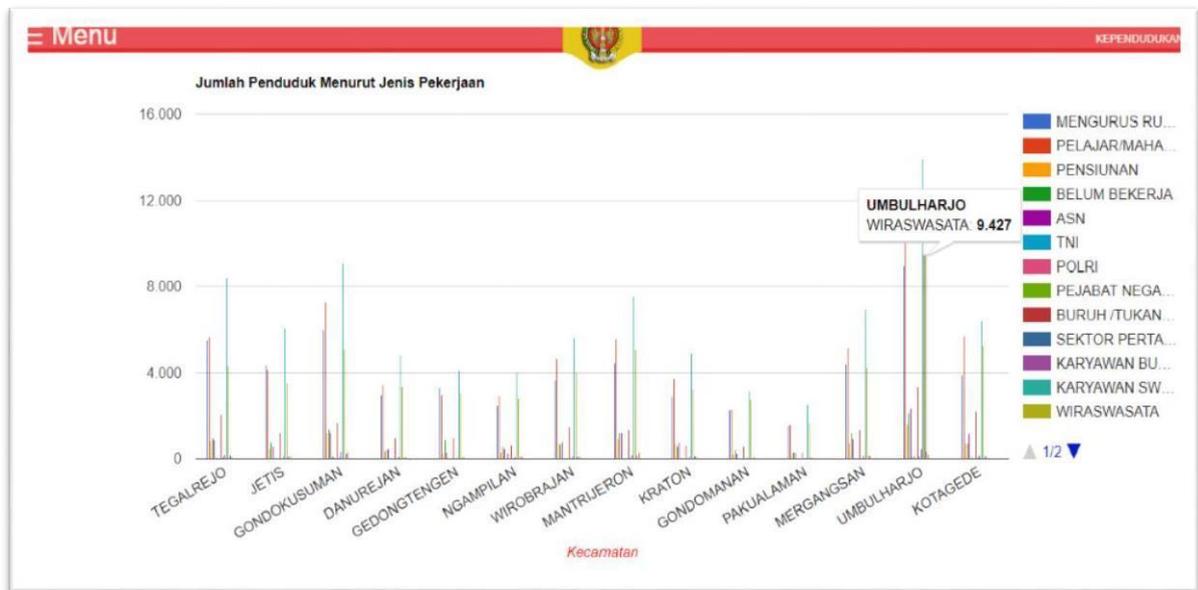
Adanya fenomena sosial seperti penurunan perekonomian masyarakat akibat pandemi COVID-19 menyebabkan pemerintah berupaya untuk mengalihkan anggarannya untuk menangani dampak wabah tersebut melalui keputusan Peraturan Pemerintah No. 1 Tahun 2020. Kecamatan Umbulharjo merupakan salah satu daerah yang berada di Kota Yogyakarta dengan jumlah karyawan swasta dan wiraswasta yang lebih tinggi dibandingkan dengan daerah lain, dengan jumlah masyarakat yang berprofesi sebagai karyawan sebesar 13.938 dan jumlah wiraswasta sebanyak 9.427.

Gambar 1 1 Jumlah Karyawan Swasta



Sumber: Dinas Kependudukan Yogyakarta

Gambar 1 2 Jumlah Wiraswasta



Sumber: Dinas Kependudukan Yogyakarta

Peraturan Pemerintah No. 1 Tahun 2020 menyatakan bahwa *refocusing* merupakan kegiatan pengutamakan penggunaan alokasi anggaran untuk kegiatan tertentu. Melalui peraturan tersebut meminta agar setiap daerah melaksanakan *refocusing* anggaran APBD yang mereka miliki untuk penanganan wabah pandemi. Bantuan Langsung Tunai yang ditetapkan oleh pemerintah pusat sebagai bantuan sosial agar masyarakat dapat melanjutkan kegiatan perekonomian berlangsung selama 6 bulan dimulai dari bulanapril-september 2020, dimana masyarakat akan menerima bantuan dana sebesar RP 600.000 untuk setiap bulannya (Fajriah, 2020).

Bantuan Langsung Tunai (BLT) merupakan bentuk bantuan yang diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat dalam bentuk sejumlah dana secara tunai ataupun dalam bentuk tertentu sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan. Pemberian BLT tersebut diperuntukan untuk keluarga yang

memiliki kondisi yang sesuai dengan syarat yang telah dibuat oleh pemerintah pusat. Keputusan yang dikeluarkan oleh kementerian keuangan (2020) keluarga yang berhak menerima bantuan langsung tunai adalah keluarga miskin di desa yang bukan penerima PKH, Kartu Sembako, dan Kartu Pra Kerja. Bentuk bantuan yang dicanangkan oleh pemerintah diharapkan dapat membantu keluarga yang merasakan dampak dari COVID-19 dalam sektor ekonomi. Namun pada pelaksanaan pendistribusian Bantuan Langsung Tunai masih mengalami kendala. Hal tersebut dikarenakan data yang digunakan untuk pemberian BLT tersebut masih tidak relevan dengan kenyataan di lapangan. Sehingga peristiwa tersebut menjadi permasalahan dilingkungan sosial.

Melihat dari kondisi pendistribusian bantuan langsung tunai yang masih mengalami kendala seperti ketidaksesuaian data penerima. Hal tersebut terjadi karena adanya *database* yang dimiliki oleh instansi terkait tidak relevan, selain itu terdapat perubahan status pekerjaan yang dialami oleh masyarakat sebelum dan setelah COVID-19. Kebijakan baru yang dibuat oleh pemerintah pusat dengan melakukan *refocusing* APBD untuk pemberian bantuan langsung tunai kepada masyarakat masih memiliki kelemahan. Perlu adanya penerapan akuntabilitas dalam *refocusing* dana APBD dengan pemberian bantuan langsung tunai kepada masyarakat menjadi salah satu tolak ukur dari keefektifan dan ketanggapan program tersebut.

Pemerintah Kota Yogyakarta merupakan salah satu instansi

pemerintahan daerah yang menyalurkan dana bantuan langsung tunai kepada masyarakatnya. Namun pada pelaksanaannya terdapat beberapa kekurangan seperti kesalahan data yang dimiliki oleh pemerintah, pihak penerima bantuan langsung tunai tidak tepat sasaran, ketidaksesuaian proses pendataan masyarakat sehingga mempengaruhi terhadap tingkat kepercayaan masyarakat kepada pemerintahan daerah. Anggaran yang digunakan oleh Pemerintah Kota Yogyakarta untuk melakukan penanganan COVID-19 berasal dari APBD 2020 yang mencapai Rp 167 miliar. Dana yang telah disiapkan akan dimanfaatkan untuk berbagai kegiatan seperti penanganan kesehatan, dampak ekonomi dan jaring pengaman sosial. Dana yang telah ditetapkan dalam APBD untuk melakukan pencegahan COVID-19 dilakukan secara bertahap (AR, 2020).

Penyaluran dana bantuan langsung tunai yang dilakukan oleh pemerintah kota yogyakarta berjumlah Rp 1.800.000 terhitung sejak bulan april, mei sampai juni yang diberikan kepada setiap kepala keluarga (Wardhani, 2020). Pendistribusian diserahkan kepada 14.300 keluarga yang terdiri dari 4.500 anggota Keluarga Sasaran Jaminan Perlindungan Sosial (KSJPS) dan 8.600 non anggota KSJPS. Dana yang disalurkan dalam bentuk paket, hal ini dikarenakan pemberian dana tersebut terlambat satu bulan dari penentuan waktu yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat. Kegiatan tersebut dilakukan secara hati-hati, hal ini disebabkan pemerintah kota yogyakarta ingin memastikan bahwa tidak ada penerima bantuan ganda. Terdapat tiga hal yang menjadi dasar bagi Dinas Sosial Kota

Yogyakarta dalam mendistribusikan dana bantuan langsung tunai, yaitu:

1. Fakta adalah fenomena nyata dimana terdapat masyarakat terdampak dari pandemi *Corona Vius*
2. Legalitas adalah penyaluran dana diserahkan berdasarkan data kemiskinan yang dimiliki, sehingga tidak diberikan secara sembarangan.
3. Anggaran adalah pengalokasian dana dilakukan dengan memprioritaskan warga miskin terlebih dahulu.

Akuntabilitas secara tradisional merupakan cara yang digunakan untuk mengendalikan dan mengarahkan perilaku secara administratif. Akuntabilitas menjadi bentuk dari pengawasan dan perilaku etis (Dubnick, 2003). Melakukan pengukuran kinerja yang baik adalah alat penting untuk membangun akuntabilitas di seluruh organisasi. Akuntabilitas tidak hanya sekedar meyakinkan publik bahwa pendapatan dikumpulkan dan dilaporkan dengan benar tetapi juga pengeluaran dilakukan sesuai dengan prosedur yang ditentukan.

“Sungguh, Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh, Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Melihat” Surat An- Nisa’ [4]:58.

ان هٰذَا الَّذِي اَنْتُمْ تُؤْتُونَ اَمْوَالَكُمْ اِذَا حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ اَمْوَالُ الْاَوْلِيَاءِ وَالْاَوْلِيَاءُ هُمُ الْمُؤْتُونَ  
 لا اَنْتُمْ اَمْوَالُهُمْ اِنْ كُنْتُمْ عَدْلًا

عَمَّا هُوَ اِنْ هٰذَا كُنْ صُوْرًا - ٨٥  
 عَطْفُكُمْ لَا سَلَامَ

Implikasi surat An-Nisa' ayat 58 dengan akuntabilitas adalah telah dipertintahkan oleh Allah SWT kepada setiap hambanya untuk menyampaikan amanat yg telah tersematkan kepada dirinya untuk diberikan kepada yang berhak, hal itu dikarenakan dengan menyampaikan amanat yang telah diberikan menjadi bentuk perwujudan dari tanggungjawab. Pertanggungjawaban atas dana yang telah digunakan memberikan jaminan kepada masyarakat bahwa sumber daya pemerintah digunakan dengan bijak serta legal. Apabila penggunaan sumber daya dapat dilakukan dengan bijak menghasilkan pelayanan publik yang baik. Selain itu, pemberian pelayanan dengan kualitas yang baik dapat dihasilkan secara efisien. Berdasarkan hal tersebut pengukuran kinerja memberikan jawaban kepada masyarakat berupa jaminan atas kualitas dari pelayanan, dan penggunaan sumber daya sesuai dengan kebijakan yang telah dibuat (Ammons, 2016).

Dalam masa pandemi COVID-19 pemerintah perlu menunjukkan pelayanan kerja yang lebih baik dan tentunya telah menjadi pusran perhatian masyarakat. Pelayanan pemerintahan yang baik dapat dilihat dari akuntabilitas dalam pelaksanaan *refocusing* dana APBD dalam penanganan wabah tersebut melalui penyaluran bantuan langsung tunai secara akurat.

Pelayanan publik yang diberikan kepada masyarakat menjadi bukti nyata kepedulian, dan pemenuhan atas kewajiban yang dimiliki oleh

pemerintah daerah. Masyarakat memiliki hak untuk memberikan penilaian

atas setiap regulasi dan tindakan yang dibuat untuk kesejahteraan keluarga. Penilaian dapat diberikan dengan memberikan tanggapan kepuasan atas kinerja pemerintah kepada masyarakat. Penilaian akan kinerja pemerintah kota Yogyakarta merupakan cara yang digunakan untuk melakukan evaluasi atas aktivitas yang telah dilaksanakan. Proses pelaksanaan evaluasi berguna untuk menelaah pelayanan publik yang diberikan apakah telah sesuai dengan kebutuhan masyarakat saat ini. Selain itu, kegiatan tersebut berfungsi untuk melihat apakah pemerintah daerah telah menerapkan dan mempertahankan akuntabilitas atas pelaksanaan *refocusing* dana APBD melalui pemberian bantuan langsung tunai kepada pihak yang berhak menerima bantuan tersebut.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah atas fenomena wabah COVID-19 dan solusi pemerintah melalui *refocusing* dana APBD, rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana peran pemerintah kota Yogyakarta dalam mengedepankan akuntabilitas dari *refocusing* dana APBD yang telah dilaksanakan ?
2. Bagaimana proses pelaksanaan reanggaran yang dilakukan pemerintah Yogyakarta dalam penanganan wabah COVID-19 ?
3. Bagaimana kinerja aparatur pemerintah kota Yogyakarta dalam menangani COVID-19 ?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Secara eksplisit, penelitian yang akan dilakukan dalam tulisan ini

memiliki tujuan serta sasaran yang hendak dicapai, yaitu:

1. Untuk mengetahui peran Pemerintah Kota Yogyakarta dalam mengedepankan akuntabilitas dari *refocusing* dana APBD yang telah dilaksanakan
2. Untuk mengetahui proses pelaksanaan reanggaranyang dilakukan Pemerintah Kota Yogyakarta dalam penanganan wabah COVID-19.
3. Untuk mengetahui kinerja aparatur pemerintah kota Yogyakarta dalam menangani COVID-19.

#### **1.4 Motivasi Penelitian**

Penelitian ini termotivasi dari adanya fenomena lapangan dimana masih terdapat kesulitan yang membutuhkan bantuan pemerintah. Kesulitan masyarakat akibat wabah COVID-19 diperburuk dengan ketidaktepatan sasaran dalam pendistribusian bantuan akibat kekacauan data. Menurut ([mediaindonesia.com](http://mediaindonesia.com), 2020) pembagian BLT masih belum tepat sasaran yang diakibatkan oleh data penerima bantuan yang tidak diperbaharui. Sehingga menimbulkan keributan dimasyarakat saat terjadinya pendistribusian bantuan langsung tunai (BLT).

.Dalam penanganan wabah COVID-19 Pemerintah Indonesia memberikan kebijakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dialih fungsikan sementara untuk membantu masyarakat yang terdampak. Penelitian ini termotivasi untuk mengetahui kinerja dari aparatur pemerintah kota yogyakarta dalam melakukan penangan COVID-19 serta

penerapan akuntabilitas dari *refocusing* dana APBD yang diterima oleh pemerintah Kota Yogyakarta.

## **1.5 Manfaat Penelitian**

### **1.5.1 Kegunaan dalam pengembangan ilmu atau manfaat dibidang teoritis**

Keberadaan penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi ilmu disiplin akuntansi khususnya dalam bidang akuntabilitas melalui penerapan *refocusing* dana APBD untuk penanganan wabah COVID-19.

### **1.5.2 Manfaat dibidang praktik**

Melalui penelitian ini diharapkan dapat memberikan pertimbangan terhadap mekanisme penyaluran bantuan langsung tunai yang telah disalurkan. Selain itu diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pembaharuan tata cara pendataan penetapan pihak yang berhak menerima bantuan langsung tunai dan penerapan akuntabilitas dari kegiatan *refocusing* dana APBD.

### **1.5.3 Manfaat untuk pengambilan keputusan atau kebijakan**

Praktisi dapat menggunakan hasil penelitian ini untuk dijadikan referensi atau pertimbangan dalam membuat sebuah kebijakan penanganan publik kepada masyarakat dengan mengindahkan prinsip-prinsip akuntansi.